

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI PROGRAM BEDAH KEMISKINAN RAKYAT
SEJAHTERA (BEKERJA) BERBASIS PERTANIAN DI NAGARI LANSEK
KADOK KABUPATEN PASAMAN**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial
(S.Sos) Pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



M. HENDRI MARTHA PRATAMA

NIM : 12170511683

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M/ 1446 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : M. HENDRI MARTHA PRATAMA
NIM : 12170511683
PROGRAM STUDI : Administrasi Negara
FAKULTAS : Ekonomi dan Ilmu Sosial
JUDUL : IMPLEMENTASI PROGRAM BEDAH KEMISKINAN RAKYAT SEJAHTERA (BEKERJA) BERBASIS PERTANIAN DI NAGARI LANSEK KADOK KABUPATEN PASAMAN

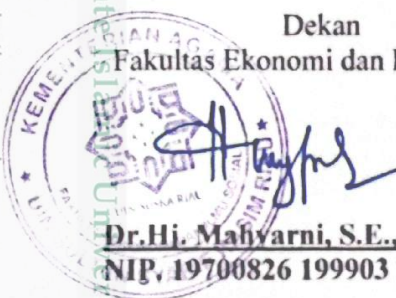
Disetujui oleh
Dosen Pembimbing

Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Mengetahui

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Ketua Program Studi
Administrasi Negara



Dr. Hj. Mahyarni, S.E., M.M.
NIP. 19700826 199903 2 001

Dr. Khairunsvah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : M. HENDRI MARTHA PRATAMA
 NIM : 12170511683
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul : IMPLEMENTASI PROGRAM BEDAH KEMISKINAN RAKYAT SEJAHTERA (BEKERJA) BERBASIS PERTANIAN DI NAGARI LANSEK KADOK KABUPATEN PASAMAN.
 Tanggal Ujian : 19 Juni 2025

TIM PENGUJI

Ketua Penguji

Dr. Khairunsvah Purba, S.Sos., M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002

Penguji 1

Ratna Dewi, S.Sos., M.Si
 NIP. 19811030 200710 2 004

Penguji 2

Candra Jon Asmara, S.Sos., M.Si
 NIP. 19760104 202321 1 001

Sekretaris

Rony Jaya, S.Sos., M.Si
 NIP. 19900324 202321 1 003



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M. HENDRI MARTHA PRATAMA
NIM : 12170511683
Tempat/Tgl. Lahir : Lubuk Layang, 10 Desember 2002
Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Prodi : Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Implementasi Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA) Berbasis Pertanian di Nagari Lensek Kadok Kabupaten Pasaman.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,.....

Yang membuat pernyataan,



M. Hendri Martha Pratama

NIM : 12170511683

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM BEDAH KEMISKINAN RAKYAT SEJAHTERA (BEKERJA) BERBASIS PERTANIAN DI NAGARI LANSEK KADOK KABUPATEN PASAMAN

Oleh:

M. HENDRI MARTHA PRATAMA

NIM : 12170511683

Penelitian ini dilatar belakangi oleh ketidakmampuan keluarga memenuhi kebutuhan pangan yang menjadi kebutuhan paling mendasar, menjadi kendala bagi upaya untuk melepas diri dari belenggu kemiskinan, dikarenakan belum optimalnya pendistribusian bantuan terhadap masyarakat, kurangnya sosialisai kepada masyarakat tentang program Bekerja, kurangnya pengawasan terhadap berjalannya program, serta kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap program Bekerja. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendeskripsikan Implementasi Program Bekerja dalam Menjamin Ketahanan Pangan Masyarakat di Nagari Lansek Kadok Kabupaten Pasaman. (2) Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Bekerja dalam Menjamin Ketahanan Pangan Masyarakat di Nagari Lansek Kadok Kabupaten Pasaman. (3) Mengidentifikasi solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam Implementasi Program Bekerja dalam Menjamin Ketahanan Pangan Masyarakat di Nagari Lansek Kadok Kabupaten Pasaman. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Nagari Lansek Kadok Kabupaten Pasaman. Informan penelitian ditentukan secara *Purposive Sampling*. Data penelitian ini didapatkan dari observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja) berbasis pertanian belum bisa dikatakan terlaksana dengan baik, karena masih terjadi ketidakmerataan pendistribusian bantuan dan masih ada masyarakat yang belum mengetahui tentang program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja) dalam menjamin ketahanan pangan masyarakat di Nagari Lansek Kadok Kabupaten Pasaman.

Kata Kunci: Implementasi kebijakan, Program, Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja), Nagari Lansek Kadok.

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE PROSPEROUS PEOPLE'S POVERTY ALLEVIATION PROGRAM (BEKERJA) BASED ON AGRICULTURE IN NAGARI LANSEK KADOK, PASAMAN REGENCY

By:

M. HENDRI MARTHA PRATAMA

NIM : 12170511683

This research is motivated by the inability of families to meet their basic food needs, which poses a barrier to efforts to break free from the shackles of poverty. This is due to the suboptimal distribution of assistance to the community, a lack of socialization about the Bekerja program, insufficient oversight of the program's implementation, and a lack of community participation and awareness regarding the Bekerja program. This study aims to: (1) Describe the Implementation of the Bekerja Program in Ensuring Food Security for the Community in Nagari Lansek Kadok, Pasaman Regency. (2) Identify the factors influencing the Implementation of the Bekerja Program in Ensuring Food Security for the Community in Nagari Lansek Kadok, Pasaman Regency. (3) Identify solutions to address the challenges in the Implementation of the Bekerja Program in Ensuring Food Security for the Community in Nagari Lansek Kadok, Pasaman Regency. This research employs a qualitative method with a descriptive nature. The research location is in Nagari Lansek Kadok, Pasaman Regency. The research informants were selected through Purposive Sampling. Data for this study were obtained from observations, interviews, and document studies. The results of this study indicate that the Implementation of the Prosperous People's Poverty Alleviation Program (Bekerja) based on agriculture cannot be considered well-executed, as there is still an uneven distribution of assistance and some community members are unaware of the Prosperous People's Poverty Alleviation Program (Bekerja) in ensuring food security for the community in Nagari Lansek Kadok, Pasaman Regency.

Keywords: *Policy implementation, Program, Prosperous People's Poverty Alleviation (Bekerja), Nagari Lansek Kadok.*

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alamin segala puji dan syukur penulis sampaikan atas kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas limpahan rahmat, dan hidayahnya kepada penulis. Shalawat beriringkan salam kepada baginda Nabi Besar Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA) Berbasis Pertanian di Nagari Lansek Kadok Kabupaten Pasaman”**. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk pemenuhan sebagian persyaratan akademis dalam menyelesaikan Program Studi Sarjana S1 Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam proses penyusunan skripsi ini tentunya penulis tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang memberikan bimbingan, arahan, bantuan, dan dukungan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sangat tulus kepada, yth:

1. Allah SWT, yang telah memberikan saya nikmat kesehatan dan kesempatan untuk menyelesaikan penelitian ini.
2. Kepada kedua orang tua yang sangat tercinta yang selalu mendo'akan, memotivasi dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus dukungan serta memberikan semangat kepada penulis yakni ayahanda Umar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- dan Ibunda Sier, S.Pd. SD, serta abang Afdhal Dinilhaq, S.Pt, kakak Fitri, M.Pd, dan adik Raditya Marzel yang selalu memberikan dukungan dan penyemangat bagi penulis.
3. Ibuk Prof. Dr. Hj. Leni Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, CA, selaku rektor Universitas Sultan Syarif Kasim Riau
 4. Ibuk Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
 5. Ibuk Dr.Hj. Julina, SE,M.Si, Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si, Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum, selaku Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
 6. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos. M.Si selaku ketua Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 7. Bapak Mashuri, MA selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
 8. Bapak Dr. Kamaruddin, S.sos, M.Si sebagai pembimbing proposal dan skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan nasehat yang sangat berharga kepada penulis dalam proses penyusunan proposal dan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
 9. Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos. M.Si selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan nasehatnya kepada penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

10. Semua Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu yang berguna untuk penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
11. Semua Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
12. Kepada Orang-orang terdekat penulis Melza Aprianti, Aditya Lukman, Ronaldi Putra, Arli Ardianto yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
13. Terima kasih juga kepada teman – teman seperjuangan ANA B 2021 yang telah menemani tahapan perkuliahan dengan penuh warna.
14. Terakhir, terimakasih banyak untuk diri sendiri, M. Hendri Martha Pratama terimakasih telah mampu berusaha semaksimal mungkin dan berjuang hingga saat ini. Mampu memutuskan untuk mengambil tindakan dan bisa memilah solusi yang tepat dan mau belajar terus dari setiap kesalahan yang diperbuat serta tidak pernah memilih untuk menyerah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis sadar bahwasanya masih terdapat banyak kekurangan baik dalam penulisan, tata bahasa maupun bentuk/struktur ilmiahnya sendiri. Oleh sebab itu, penulis dengan terbuka serta senang hati menerima kritikan dan saran-saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini nantinya. Semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi pembaca dan hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri dan memohon pertolongan. Amin...

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pekanbaru, 13 Juni 2025

Penulis

M. Hendri Martha Pratama

NIM : 12170511683



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.5 Sistematika Penulisan	14
BAB II LANDASAN TEORI	16
2.1 Konsep Kebijakan Publik.....	16
2.2 Program.....	30
2.3 Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja)	35
2.4 Pandangan Islam Terhadap Implementasi Kebijakan	39
2.5 Penelitian Terdahulu.....	41
2.6 Definisi Konsep.....	44
2.7 Konsep Operasional	48
2.8 Kerangka Berfikir	49
BAB III METODE PENELITIAN	50
3.1 Jenis Penelitian	50
3.2 Lokasi Penelitian	51
3.3 Informan Penelitian	51
3.4 Jenis dan Sumber Data	52
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	53
3.6 Teknik Analisis Data	55
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	58
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Pasaman	58
4.2 Gambaran Umum Nagari Lansek Kadok.....	59



4.3	Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman.....	65
BAB V PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN		67
5.1	Implementasi Kebijakan Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja) Berbasis Pertanian di Nagari Lansek Kadok Kabupaten Pasaman	68
5.2	Faktor-Faktor yang Menjadi Penghambat/memengaruhi Implementasi Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja) Berbasis Pertanian di Nagari Lansek Kadok Kabupaten Pasaman.....	83
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....		93
6.1	Kesimpulan	93
6.2	Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA		95

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jenis bantuan, Jangka Pendek Dan Jangka Menengah dan Jangka Panjang Program Bekerja.....	6
Tabel 1. 2 Kriteria Penerima Bantuan Dan Jenis Bantuan Program Bekerja	8
Tabel 1. 3 Rumah Tangga Miskin	10
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	41
Tabel 2. 2 Konsep Operasional	48
Tabel 3. 1 Informan Penelitian	52
Tabel 4. 1 Keadaan Ekonomi Masyarakat Nagari Lansek Kadok Kabupaten Pasaman 2024	63
Tabel 5. 1 Struktur Kepengurusan Pelaksanaan Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja) di Kabupaten Pasaman.....	77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir	49
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Nagari Lansek Kadok	64
Gambar 5. 1 Prosedur Pelaksanaan Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja)	82
Gambar 5. 2 Perkarangan Tanaman Bantuan Program Bekerja	88
Gambar 5. 3 Kandang Ayam Penerima Bantuan Program Bekerja	88



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan secara umum dapat dibedakan dalam beberapa pengertian. Menurut Sumodiningrat (1989) mengklasifikasikan pengertian kemiskinan sekurang kurangnya dalam lima kelas, yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural, kemiskinan kronis dan kemiskinan sementara. Identifikasi masing-masing kelas kemiskinan tersebut adalah seperti berikut.

Kemiskinan Absolut, diartikan apabila tingkat pendapatan seseorang di bawah garis kemiskinan atau sejumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum (*basic needs*), antara lain kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk hidup dan bekerja. Badan Pusat Statistik. (2024). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Kemiskinan Relatif, adalah bila seseorang yang mempunyai penghasilan di atas garis kemiskinan, namun relatif lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan masyarakat sekitarnya. Kemiskinan relatif erat kaitannya dengan masalah pembangunan yang sifatnya struktural, yakni kesenjangan akibat kebijaksanaan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat. (Michael P. Todaro, 2006)

Kemiskinan Kultural, mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya tidak mau berusaha untuk memperbaiki



tingkat kehidupan meskipun ada usaha dari pihak luar untuk membantunya.
(Lewis, 1966)

Kemiskinan Kronis, disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: Kondisi sosial budaya yang mendorong sikap dan kebiasaan hidup masyarakat yang tidak produktif, keterbatasan sumber daya dan keterisolasian (daerah – daerah kritis sumber daya dan daerah terpencil) dan Rendahnya taraf pendidikan dan derajat perawatan kesehatan, terbatasnya lapangan kerja dan ketidakberdayaan masyarakat dalam mengikuti ekonomi pasar. Suryadiningrat (2003) dalam Rahmawati (2006)

Kemiskinan Sementara, terjadi akibat adanya Perubahan siklus ekonomi dari kondisi normal menjadi krisis ekonomi, Perubahan yang bersifat musiman seperti dijumpai pada kasus kemiskinan nelayan dan pertanian tanaman pangan dan bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. (Badan Pusat Statistik, 2022; Suharto, 2019).

Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang harus dipecahkan. Penanggulangan kemiskinan secara sinergis dan sistematis harus dilakukan agar seluruh warga negara mampu menikmati kehidupan yang bermartabat. Oleh karena itu, sinergi seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan. Pemerintah saat ini memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegritas mulai dari program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemberdayaan masyarakat, serta pemberdayaan usaha kecil yang dijalankan oleh berbagai elemen pemerintah.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan. Sebagai bagian dari implementasinya Kementerian Pertanian dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2019. (PERMENTAN RI NO. 14 Th 2019)

Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian yang selanjutnya disebut Program Bekerja adalah upaya peningkatan produksi komoditas pertanian untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan melalui kegiatan pertanian dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin. (PERMENTAN RI NO. 14 Th 2019)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mekanisme dari program BEKERJA ini meliputi:

- a. kriteria lokasi, penerima dan jenis bantuan;
- b. pelaksanaan Program Bekerja;
- c. pembinaan dan pengendalian;
- d. pemantauan dan pelaporan;
- e. pendanaan dll. (*PERMENTAN RI NO. 14 Th 2019*)

Dengan keluarnya Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan peternakan Kabupaten Pasaman yang berlandaskan dasar hukum dengan surat keputusan nomor 521/28/TP-DISTAN/2019 tentang penetapan usulan rumah tangga miskin pertanian (RTMP) bahwa pemerintah terus berupaya menurunkan angka kemiskinan di Indonesia melalui percepatan penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan bahwa upaya pengentasan kemiskinan menjadi perhatian Kementrian Pertanian karena sebaran kemiskinan sebagian besar berada di wilayah pedesaan dengan mata pencarian pertanian.

Dalam Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan Program Bekerja dengan tujuan memberdayakan/meningkatkan kapasitas masyarakat miskin dalam melaksanakan usaha pertanian guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan melalui kegiatan pertanian yang terintegrasi. (Pedoman Program BEKERJA Th. 2018)



Adapun tujuan dari Program Bekerja yaitu :

- a. Menjamin ketahanan pangan untuk kesehatan dan kecukupan gizi RTM melalui pengadaan pangan dari hasil produksi sendiri;
- b. Menciptakan sumber pendapatan baru RTM melalui pembentukan usaha pertanian multi komoditas bernilai tinggi;
- c. Meningkatkan produksi, nilai tambah, dan daya saing usaha pertanian melalui inovasi;
- d. Meningkatkan kapasitas dan daya tawar RTM dengan mendirikan dan memberdayakan kelembagaan ekonomi petani; dan
- e. Menumbuhkembangkan perekonomian lokal melalui pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. (*PERMENTAN RI NO. 14 Th 2019*)

Kabupaten Pasaman merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang ada di provinsi Sumatera Barat Indonesia yang telah menjalankan program Bekerja ini dari sekian banyaknya kabupaten/kota yang juga telah mendapatkan bantuan program Bekerja ini dan dimulai dari bulan Agustus 2019 serta merupakan salah satu program strategis dari Kementerian Pertanian. Dari data BPS (Badan pusat Statistik) persentase jumlah masyarakat miskin sejak tahun 2020 terhitung dengan persentase pada tahun 2020 mencapai 7,16%, selanjutnya pada tahun 2021 mencapai 7,48% dan pada tahun 2022 mencapai 6,85%.

Pada tahun 2021 tingkat kemiskinan di kabupaten pasaman mengalami kenaikan dan angka kemiskinan di nagari Lansek Kadok masih diperkirakan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebanyak 32,5% yang diakibatkan oleh ketidaktersediaan lahan dan rendahnya sumber daya manusianya sendiri dan nagari lansek kadok ini memiliki banyak masyarakat miskin dan cuma berperkerjaan petani. Jadi untuk mengurangi angka kemiskinan itu pemerintah mengupayakan program BEKERJA untuk meningkatkan penghasilan Rumah Tangga Miskin (RTM). Pengentasan kemiskinan saat ini menjadi perhatian karena sebaran kemiskinan sebagian besar berada di wilayah pedesaan dengan mata pencaharian pertanian.

Salah satu upaya pengetasan kemiskinan tersebut di pedesaan adalah dengan memberikan kegiatan produktif kepada kelompok masyarakat yang dapat meningkatkan penghasilan. Ini adalah salah satu wujud nyata negara hadir di tengah-tengah masyarakat yang belum beruntung. Program ini langsung ke rumah tangga miskin yang bergerak di sektor pertanian. Bantuan program Bekerja diarahkan pada komoditas yang mempunyai keunggulan komparatif di masing-masing daerah yang menghasilkan nilai ekonomi tinggi dan difokuskan pada satu wilayah penduduk miskin yang dikelompokkan menjadi 3 kluster.

Tabel 1. 1 Jenis bantuan, Jangka Pendek Dan Jangka Menengah dan Jangka Panjang Program Bekerja

No.	Jenis Bantuan	Jangka pendek	Jangka menengah	Jangka Panjang
	Sayur-sayuran	Kangkung, Bayam, Sawi, Kacang Panjang, Pare, Timun, Buncis, dan Jagung Manis satu bungkus/KK beserta polybag		
	Bibit Ayam Petelur		berumur dua bulan 50 ekor/KK beserta	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			kandang yang dimana biaya kandang 500 ribu/KK dan pakan 200 kg/KK.	
3	Tanaman Perkebunan			coklat 4 batang/KK dan durian unggul 1 batang/KK.

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman 2024

Melalui program Bekerja ini diharapkan RTM diperkirakan sudah mampu memperoleh pendapatan sekitar Rp 2 juta sampai Rp 2,3 juta/bulan atau Rp 550 ribu/kap/bulan. Besaran pendapatan ini jauh dari batas garis kemiskinan yaitu sekitar Rp 370 ribu/kap/bulan. Jenis bantuan hortikultura yang diberikan adalah benih dan saprodi durian seluas 63 hektare dan sayuran seluas 25 hektare. Komoditas sayuran yang dipilih adalah bayam, kangkung, caisim, kacang panjang dan buncis.

Dari bantuan yang diberikan oleh kementerian Pertanian, total anggaran program Bekerja di Kabupaten Pasaman mencapai Rp 1,4 miliar, dan di daerah nagari Lansek Kadok mendapatkan bantuan realisasi anggaran sejumlah 450 jt. Paket bantuan yang diberikan kepada setiap RTMP berupa paket benih dan sarana produksi untuk komoditas sayuran daun dan durian. Jenis sayuran daun bisa dipilih yang mudah dibudidayakan dan cepat menghasilkan seperti kangkung, bayam, sawi hijau/caisim, buncis, kacang panjang. Sementara jenis durian yang diberikan adalah varietas unggul yang sesuai untuk agroklimat setempat. Khusus Pasaman, diberikan benih durian varietas matahari. Setiap RTMP juga menerima paket bantuan bibit ayam unggul lengkap dengan kandang, pakan dan vaksinnnya. Sesuai arahan Menteri yang disampaikan di beberapa tempat saat launching

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

program bekerja, bahwa Program Bekerja ini adalah sebagai solusi permanen dalam mengentaskan kemiskinan di pedesaan khususnya RTM yang bergerak di sektor pertanian. Untuk komoditas peternakan per RTM diberikan bantuan sebanyak 50 ekor ayam produktif yang berusia sekitar 4-8 minggu. Selain itu juga diberikan bantuan pakan, kandang dan obat-obatan. Bantuan lainnya seperti pemberian benih pisang dan sayuran, serta tambahan sarana produksi seperti pupuk organik dan pupuk non organik.

Tabel 1. 2 Kriteria Penerima Bantuan Dan Jenis Bantuan Program Bekerja

No	Kriteria	Penerima Bantuan	Jenis Bantuan	Anggaran
1	Jumlah RTM	Bantuan Pemerintah dalam program Bekerja diberikan kepada RTMP yang tinggal di Desa/Kelurahan pada Kecamatan	Ayam	Sumber pendanaan untuk program Bekerja berasal dari anggaran Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019 dan/atau sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2	Memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif komoditas		Kandang ayam serta sarana dan prasarana lainnya	
3	Tidak ada kejadian wabah penyakit hewan		Benih tanaman hortikultura	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

No	Kriteria	Penerima Bantuan	Jenis Bantuan	Anggaran
	menular tertentu dan organisme pengganggu tumbuhan (OPT)			
4	Dukungan pemerintah daerah kabupaten		Benih tanaman perkebunan	

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman 2024

Dari tabel diatas bahwasanya terdapat kriteria, penerima bantuan, jenis bantuan dan juga anggaran dalam kebijakan program bedah kemiskinan rakyat sejahtera tersebut.

Dalam pelaksanaan program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja) berbasis pertanian, penting untuk memiliki struktur yang jelas agar program dapat berjalan dengan lancar dan mempermudah proses pelaksanaannya. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh setiap pelaksana sebagai penanggung jawab program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja), Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura serta Kepala Bidang Pertanian dan Peternakan melaksanakan tugas berikut:

- a. Melakukan sosialisasi dan koordinasi kegiatan di tingkat Kabupaten;
- b. Melakukan verifikasi RTMP calon penerima bantuan bersama satuan kerja pelaksana;
- c. Melakukan pembinaan bersama Dinas Terkait dan TKSK, monitoring dan evaluasi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1. 3 Rumah Tangga Miskin

No	Jorong	Jumlah Rumah Tangga Miskin (KK)	
		Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Jorong Kotanopan Setia	59	85
2.	Jorong Rambahan	86	151
3.	Jorong Beringin	53	63
4.	Jorong Lansek Kadok	67	136
5.	Jorong Kota Panjang	66	79
	Jumlah	331	514

Sumber: kantor wali nagari Lansek Kadok 2024

Program bekerja ini memiliki konsep dengan memberdayakan masyarakat melalui peningkatan kapasitas ekonomi dan sosial, terutama disektor pertanian serta mempertimbangkan kondisi lokal seperti agroklimak dan kultur tanaman. Sementara itu, konsep bansos pada umumnya lebih mengarah ke umum dan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, tanpa penekanan khusus pada pengembangan jangka panjang. Selain itu, program bekerja berorientasi pada pengembangan potensi daerah dan keunggulan komparatif, sehingga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan lebih strategis dalam jangka panjang. Di sisi lain, bansos sering kali hanya memberikan bantuan finansial yang bersifat sementara, tanpa mengatasi akar permasalahan kemiskinan.

Program bekerja tidak hanya sekedar memberikan bantuan, namun disertai dengan pendampingan dan edukasi kepada RTM guna meningkatkan usaha



mandiri. Aksi ini sebagai wujud nyata Kementerian Pertanian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat (petani) dan akselerasi penurunan angka kemiskinan. (Media Auditor Edisi 48-September 2018 tentang Tata Kelola Bantuan Pemerintah Sektr Pertanian, 2020)

Pelaksanaan program bekerja ini melibatkan sosialisasi kepada masyarakat dengan mengunjungi setiap kecamatan, dihadiri oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), kapolsek, dan jorong dari setiap Nagari, serta melibatkan sejumlah masyarakat setempat. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja) Berbasis Pertanian.

Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan program bekerja dengan terlebih dahulu mendekati masyarakat untuk menjelaskan manfaat dari pelaksanaan program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja) melalui Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Selanjutnya, masyarakat dilibatkan dalam setiap kegiatan agar program ini dapat berjalan efektif, sesuai dengan keinginan, kemampuan, dan kebutuhan mereka.

Dengan uraian diatas, didalam pelaksanaan program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja) di Nagari Lansek Kadok Kabupaten Pasaman ini peneliti masih menemukan beberapa fenomena dalam pelaksanaannya salah satunya:

1. Kurangnya atau masih minim pelatihan/pengawasan yang diberikan dari pemerintah daerah terhadap Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

(TKSK) untuk mengenalkan kepada masyarakat mengenai bagaimana cara membudidayakan bantuan yang telah diberikan.

2. Belum maksimalnya sosialisasi mengenai program bekerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
3. Kurangnya partisipasi TKSK dalam menginformasikan manfaat terhadap Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera sehingga masyarakat kurang mengetahui adanya program tersebut.

Berdasarkan fenomena dan latar belakang yang telah dijabarkan di atas perlu di lihat kembali sejauh mana Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja) dapat efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta sudah berjalan baik atau tidak pelaksanaannya hingga saat ini. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Implementasi Kebijakan Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja) Berbasis Pertanian di Nagari Lansek Kadok Kabupaten Pasaman.”***

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja) Berbasis Pertanian di Nagari Lansek Kadok Kabupaten Pasaman?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi dalam Implementasi Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja) Berbasis Pertanian di Nagari Lansek Kadok Kabupaten Pasaman?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja) Berbasis Pertanian di Nagari Lansek Kadok Kabupaten Pasaman.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi dalam Implementasi Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja) Berbasis Pertanian di Nagari Lansek Kadok Kabupaten Pasaman.

1.4 Manfaat Penelitian

Setelah menguraikan permasalahan-permasalahan yang dibahas, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan pengetahuan yang terkait Ilmu Administrasi Negara, khususnya kajian tentang Kebijakan Publik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan atau program kerja dalam pengembangan pemerintah daerah.

b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai Implementasi Kebijakan Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja) Berbasis Pertanian di Nagari Lansek Kadok Kabupaten Pasaman.

c. Bagi Peneliti Lanjutan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai bahan referensi dan perbandingan bagi peneliti untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk dapat menggambarkan rangkaian pembahasan secara sistematis sehingga kerangka proposal skripsi menjadi jelas dan terstruktur, serta fokus kajian penelitian tidak keluar dari pokok pembahasan.

BAB I :PENDAHULUAN

Bab ini terdiri tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II :LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan teori-teori yang akan dijadikan acuan dalam menganalisis permasalahan pada penelitian, menguraikan penelitian terdahulu, konsep operasional kerangka berpikir.

BAB III :METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, informan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV :GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang sejarah objek penelitian, struktur organisasi, visi misi dan gambaran umum terkait objek penelitian.

BAB V : HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

Pada bab ini akan menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA) Berbasis Pertanian diNagari Lansek Kadok Kabupaten Pasaman.

:PENUTUP

Pada Bab ini adalah penutup, yang menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Kebijakan Publik

Di dalam proses kebijakan publik ada salah satu tahapan penting, yaitu tahap implementasi. Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah satu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. (Gaffar, 2009)

Ripley dan Franklin (Adriansyah et al., 2021) menjelaskan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh beberapa faktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.

Implementasi kebijakan dalam arti seluas-luasnya sering dianggap sebagai pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama diatur beragam pemangku kepentingan (*stakeholder*), sektor, organisasi (*public atau privat*), prosedur, dan teknik secara sinergitis yang digerakkan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan kearah tertentu yang dikehendaki. Rasionalitas atau alasan di balik langkah seperti ini tak lain dimaksudkan agar sikap, perilaku, dan pikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari semua pemangku kepentingan yang terlibat dapat lebih terkontrol serta tetap terjaga pada relnya. (Wahab, 2014)

Pengertian yang sangat sederhana tentang implementasi adalah sebagaimana diungkapkan oleh Jones (1980) dalam (Zulkarnain, 2017), dimana implementasi diartikan sebagai *“getting a job done”* dan *“doing a”*. tetapi di balik kesederhanaan rumusan yang demikian berarti bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah.

Dalam (Pasolong, 2010), Grindle (1980) implementasi sering dilihat sebagai suatu proses yang penuh dengan muatan politik dimana mereka yang berkepentingan berusaha sedapat mungkin mempengaruhinya. Hinggis (1985), mendefinisikan implementasi sebagai rangkaian dari berbagai kegiatan yang didalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategi.

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik yang menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan publik serta dapat diterima oleh publik. Dalam hal ini, dapat ditekan bahwa bisa saja dalam tahapan perencanaan dan formulasi kebijakan dilakukan dengan sebaik-baiknya, tetapi jika pada tahapan implementasinya tidak diperhatikan optimalisasinya, maka tentu tidak jelas apa yang diharapkan dari sebuah produk kebijakan itu. Pada akhirnya pun dipastikan bahwa pada tahapan evaluasi kebijakan, akan menghasilkan penilaian bahwa antara formulasi dan implementasi kebijakan tidak sering sejalan, bahwa implementasi dari kebijakan



itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, bahkan menjadi produk kebijakan itu sebagai batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri. (Aneta, 2012)

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tindakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya terhadap pengambilan keputusan. Implementasi kebijakan publik adalah tahapan penting dalam realisasi kebijakan publik secara komprehensif. Dan dalam bagian ini akan disajikan beberapa pendapat mengenai implementasi kebijakan publik. Menurut Cleaves (Waluyo, 2007:49), “implementasi kebijakan dianggap sebagai suatu proses tindakan administrasi dan politik (*a proces of moving to ward a policy objective by mean admnistrative and political steps*)”.

Kemudian menurut Wibawa (Tahir, 2014), tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. Keseluruhan proses penetapan kebijakan baru bisa dimulai apabila tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program telah dirancang dan juga sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut.

Dalam impelementasi kebijakan terdapat berbagai hambatan. Gow dan Morss dalam (Pasolong, 2007) mengungkapkan antara lain:

1. Hambatan politik, ekonomi dan lingkungan.
2. Kelemahan institusi.
3. Ketidakmampuan SDM dibidang teknis dan administrative.
4. Kekurangan dalam bantuan teknis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

5. Kurangnya desentralisasi dan partisipasi.
6. Pengaturan waktu.
7. System informasi yang kurang mendukung.
8. Perbedaan agenda tujuan antar actor.
9. Dukungan yang berkesinambungan.

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (Agustino, 2008) mendefenisikan implementasi kebijakan sebagai “pelaksanaan keputusan kebijakansanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.

Menurut Van Horn dan Van Meter (Agustino, 2008): tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”.

(Indiahono, 2009) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan menunjuk aktivitas menjalankan kebijakan dalam ranah senyatanya, baik yang dilakukan oleh organ pemerintah maupun para pihak yang telah ditentukan dalam kebijakan. Implementasi kebijakan adalah tahap yang penting dalam kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar



aplikabel di lapangan dan berhasil untuk menghasilkan output dan outcomes seperti yang telah direncanakan.

Menurut (D, 2006) implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasi kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Ada beberapa parameter dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan:

1. *Policy Failure (Bad policy or Bad Implemntation)*;
2. Struktur dan dinamika lingkungan strategis;
3. System pelaksanaan;
4. Kompetensi dalam pengelolaan pelaksanaan kebijakan.

Sementara itu menurut (D, 2006) ada empat hal yang harus dipenuhi untuk mencapai efektivitas implementasi kebijakan, yaitu:

1. Apakah kebijakannya sendiri sudah tepat yaitu dengan melihat kemampuan kebijakan dalam menyelesaikan masalah yang hendak dipecahkan dan apakah kebijakan tersebut telah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan;
2. Tepat pelaksanaannya, actor implementasi kebijakan itu tidak hanya pemerintah saja, tetapi juga kerja sama pemerintah dan masyarakat/swasta dan implemmentasi kebijakan yang diswastakan;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tepat target, ketetapan ini berkenaan dengan 3 hal yaitu target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah ada tumpang tindih dengan intervensi lain atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain;
4. Tepat lingkungan, ada dua lingkungan yang menentukan yaitu lingkungan kebijakan dan lingkungan interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan serta lembaga lain yang terkait.

Dari beberapa pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah tahapan kebijakan yang dilakukan setelah kebijakan tersebut selesai dilaksanakan. Implementasi juga dapat dikatakan sebagai tahap pelaksanaan dari aturan-aturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau aktor kebijakan.

Model-Model Implementasi Kebijakan

Dalam (Wahab, 2015) kategori implementasi yang luas berupaya mengembangkan teori (analytical framework) yang mengidentifikasi faktor-faktor yang memberikan kontribusi pada terwujud atau tidak terwujudnya tujuan kebijakan yang telah digariskan, hal ini yang kemudian dikenal dengan istilah pendekatan *top-down* dan *bottom-up*. Logika dalam pendekatan *top-down* selalu diawali dengan keputusan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- a. Sampai sejauh mana tindakan para pelaku implementasi serta kelompok sasaran sejalan/konsisten dengan tujuan serta prosedur di dalam keputusan kebijakan?
- b. Sampai sejauh mana tujuan telah dicapai setelah program/proyek/aktivitas tertentu dijalankan beberapa waktu, atau sejauh mana dampak yang timbul benar-benar konsisten dengan tujuan?
- c. Apa yang menjadi faktor-faktor utama yang mempengaruhi keluaran (*output*) dan dampak (*impact*) kebijakan, baik yang relevan bagi kebijakan pemerintah maupun kebijakan politis lain yang signifikan?
- d. Bagaimana kebijakan di formulasikan dari waktu ke waktu sejalan dengan pengalaman yang diperoleh?

Sedangkan pendekatan *bottom-up* yang dikembangkan oleh, Hjern, dan Porter (1978) dimulai dengan identifikasi jejaring actor-aktor yang terlibat dalam penyampaian layanan di satu atau lebih area local, dan mereka kemudian ditanyai tentang tujuan, strategi, aktivitas, dan kontak yang sudah mereka buat. Pendekatan ini selanjutnya menggunakan kontak-kontak tersebut sebagai sarana pengembangan teknik pembentukan jejaring untuk mengidentifikasi actor-aktor local, regional, dan nasional yang terlibat selama proses perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaan program-program pemerintah maupun non pemerintah yang terkait. Ini memberikan mekanisme pergerakan dari birokrat level bawah (bottom) hingga ke para pembuat kebijakan puncak (top) dalam sektor public maupun privat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ada beberapa model mengenai implementasi kebijakan sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

1) Model implementasi kebijakan Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Model implementasi kebijakan dari Meter dan Horn menetapkan beberapa variabel yang diyakini dapat mempengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan. Beberapa variabel yang terdapat dalam Model Meter dan Horn adalah sebagai berikut.

- a) Standar dan Saran Kebijakan, pada dasarnya adalah apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak, jangka pendek, menengah atau panjang. Kejelasan dan sasaran kebijakan harus dapat dilihat secara spesifik sehingga diakhir program dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan atau program yang dijalankan.
- b) Sumber Daya, menunjuk kepada seberapa besar dukungan financial dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program atau kebijakan.
- c) Komunikasi Antar-Bahan *Pelaksana*, menunjuk kepada mekanisme prosedur yang dicanangkan untuk mencapai sasaran dan tujuan program. Komunikasi ini harus ditetapkan sebagai acuan, misalnya seberapa sering rapat rutin akan diadakan, tempat dan waktu. Komunikasi antar-organisasi juga menunjukkan adanya tuntunan saling dukung antar-institusi yang berkaitan dengan program/kebijakan.
- d) Karakteristik Badan Pelaksana, menunjuk seberapa besar daya dukung struktur organisasi, nilai-nilai berkembang, hubungan dan komunikasi yang terjadi di internal birokrasi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

e) Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik, menunjukkan bahwa lingkungan dalam ranah implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan itu sendiri.

f) Sikap Pelaksana, menunjuk bahwa sikap pelaksana menjadi variabel penting dalam implementasi kebijakan. Seberapa demokratis, antusias, dan responsif terhadap kelompok sasaran dan lingkungan, beberapa yang dapat ditunjuk sebagai bagian dari sikap pelaksana ini.

2) Model implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (1978; 1986)

Menurut dua pakar ini, untuk dapat mengimplementasikan kebijakan publik secara sempurna diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Syarat-syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan yang serius.
- b. Untuk pelaksanaan program, tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai
- c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
- d. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kualitas yang andal.
- e. Hubungan kualitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
- f. Hubungan saling ketergantungan harus kecil.
- g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
- h. Tugas-tugas terperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.

j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

3) Model Implementasi Kebijakan Sabatier dan Mazmanian

Dalam (Wibawa, 1994) menurut pakar ini, implementasi kebijakan mempunyai fungsi dari tiga variabel. Implementasi akan efektif apabila dalam pelaksanaannya mematuhi apa yang sudah digariskan oleh peraturan atau petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Ketiga variabel yang dimaksud ialah:

- a. Karakteristik masalah.
- b. Struktur manajemen program tercemin dalam berbagai macam peraturan yang mengoperasionalkan kebijakan.
- c. Faktor-faktor diluar aturan.

4) Model Implementasi George C. Edward III

Model implementasi kebijakan George C. Edward III dalam (Indiahono, 2009) menunjuk empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Empat variable tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Lebih lengkap dijelaskan sebagai berikut:

- a. Komunikasi, yaitu menunjukkan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group).
- b. Sumber Daya, yaitu menunjukkan setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis.

d. Struktur Birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting yaitu mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri.

5) Model Implementasi Merilee S. Grindle

Dalam (Subarsono, 2005) keberhasilan implementasi menurut Marilee S. Grindle (1980) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan, dan lingkungan implementasi. Variabel isi kebijakan ini mencakup:

- a. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau termuat dalam isi kebijakan;
- b. Jenis manfaat yang diterima oleh target group;
- c. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dan sebuah kebijakan;
- d. Apakah letak sebuah program sudah tepat;
- e. Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci;
- f. Apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup:

- a. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan;
- b. Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa;
- c. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.



6) Model Implementasi Charles O. Jones

Menurut Jones (1996) (Agustino, 2016) menyebutkan dalam melaksanakan aktivitas implementasi program atau pelaksanaan kebijakan, terdapat tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan secara seksama, yakni:

- a. Interpretasi, Menafsirkan bahasa kebijakan menjadi rencana dan pengarahannya yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan;
- b. Pengorganisasian, Pembentukan atau menata ulang sumber daya, unit, dan metode agar kebijakan dapat memberikan hasil atau dampak;
- c. Penerapan, Ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

Secara lebih rinci mengenai interpretasi, pengorganisasian dan penerapan/aplikasi, dimaknai sebagai berikut. Pertama, interpretasi merupakan aktivitas penjelasan substansi dan suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami, sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan. Kedua, pengorganisasian merupakan suatu upaya menetapkan dan menata kembali sumber daya, unit-unit dan metode-metode yang mengarah pada upaya mewujudkan merealisasikan kebijakan menjadi hasil sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan). Terakhir, ketiga yaitu penerapan/aplikasi merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ada.

Bertumpu pada apa yang dikemukakan oleh Charles O. Jones di atas, maka masalah implementasi kebijakan publik atau implementasi program semakin lebih



jelas dan luas. Dimana implementasi merupakan proses yang memerlukan tindakan-tindakan sistematis dari interpretasi, pengorganisasian, dan penerapan/aplikasi.

Pada penelitian ini model yang peneliti gunakan adalah model dari Teori Charles O. Jones. Model implementasi kebijakan Charles O. Jones (Agustino, 2016) menyebutkan dalam melaksanakan aktivitas implementasi program atau pelaksanaan kebijakan, terdapat tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan secara seksama, yakni:

- a. Interpretasi merupakan aktivitas penjelasan substansi dan suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami, sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan.
- b. Pengorganisasian merupakan suatu upaya menetapkan dan menata kembali sumber daya, unit-unit dan metode-metode yang mengarah pada upaya mewujudkan (merealisasikan kebijakan menjadi hasil sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan).
- c. Penerapan/aplikasi merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ada.



Faktor-Faktor yang Menjadi Penentu Berhasil atau Tidaknya Suatu Proses Implementasi Kebijakan

Van Meter dan Van Horn (Situmorang et al., 2021) menekankan pada variabel-variabel yang mempengaruhi keberhasilan dalam proses implementasi kebijakan yaitu:

1. Ukuran dasar dan tujuan kebijakan;
2. Sumber-sumber kebijakan;
3. Komunikasi antar organisasi kegiatan-kegiatan pelaksana;
4. Karakteristik badan-badan pelaksana;
5. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik;
6. Kecendrungan pelaksana

Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan berguna di dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh, hendaknya dirumuskan dengan jelas agar tujuan dapat tercapai dimana kejelasan rumusan standard an tujuan kebijakan sangat menentukan kinerja kebijakan dari isi rumusan kebijakan tersebut. Dengan adanya petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang ada dapat menjadi pegangan bagi pelaksana kebijakan sehingga tidak menyimpang dari tujuan yang sebenarnya.

Sumber-sumber kebijakan atau sumber daya diperlukan untuk mendukung kelancaran implementasi kebijakan secara efektif yang meliputi sumber daya manusia misalnya keahlian, dedikasi, kreatifitas, keaktifan dan sumber daya dana, sarana maupun prasarana. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

pelaksanaan menyangkut kejelasan, ketetapan, konsistensi, dalam mengkomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuan tersebut sehingga akan memudahkan pelaksana dalam pencapaian tujuan kebijakan. Dengan demikian keberhasilan implementasi memerlukan jalinan komunikasi yang baik. Komunikasi tersebut mencakup baik intern maupun ektern, yakni hubungan kelompok sasaran maupun antar organisasi.

Karakteristik-karakteristik badan-badan pelaksana menyangkut norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan, yang terdiri dari ciri-ciri struktur formal dari organisasi-organisasi dan atribut-atribut yang tidak formal dari personil mereka.

Kondisi sosial, ekonomi, dan politik, adalah tersedianya sumber daya ekonomi yang dapat mendukung kelancaran implementasi kebijakan dan menyangkut lingkungan sosial dan politik yang mempengaruhi yurisdiksi atau organisasi dimana implementasi dilaksanakan. Kecenderungan pelaksana (*implementor*) menyangkut persepsi-persepsi pelaksana untuk mendukung atau menentang kebijakan. Tanpa adanya persepsi yang sama antara pelaksana dan pembuat keputusan akan menghambat bagi kelancaran implementasi kebijakan.

2.2 Program

Program pada dasarnya adalah bagian dari rencana. Biasannya yang dimaksud dengan program adalah satuan atau unit kegiatan, berupa sistem yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

tersusun dari rangkaian kegiatan, kegiatan tersebut tidak dijalankan sekaligus tetapi dilaksanakan secara terus menerus. Yang dimaksud dengan sistem itu sendiri adalah gabungan dari beberapa bagian program yang saling bekerjasama demi mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam sistem. Kemudian, program juga mampu didefinisikan sebagai penjelasan dari rencana, dan juga dapat dikatakan sebagai kerangka dasar pelaksanaan kegiatan.

Secara umum pengertian program adalah penjabaran dari suatu rencana, dalam hal ini program merupakan bagian dari perencanaan dan sering pula diartikan bahwa program adalah kerangka dasar dari pelaksanaan suatu kegiatan.

Di dalam sebuah program dibuat beberapa aspek, yaitu mengenai tujuan yang akan dicapai, kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan, aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui, perkiraan anggaran yang dibutuhkan serta strategi pelaksanaan. Menurut Charles O Jones (dalam Patasaka, 2016:12) pengertian program adalah cara yang dapat membantu seseorang untuk mengidentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak yaitu:

1. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan atau sebagai pelaku program.
2. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadang biasanya juga di identifikasikan melalui anggaran.
3. Program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan manfaat program dapat dilihat dari pendapat Bintoro Tjokroamidjojo sebagai berikut:

“Suatu program dianggap baik biasanya sering mempunyai unsur inovatif (pembaharuan), adanya suatu inisiatif baru, pendekatan eksperimental dan aplikasi gagasan baru. Dengan demikian program tersebut bersifat pembangunan”.(Tjokroamidjojo, 1984 dalam Setiagustina, 2017).

Berdasarkan apa yang dijelaskan diatas sebuah program dalam pelaksanaan kebijakan publik diharapkan selain menghasilkan sesuatu dalam penyelesaian masalah dilingkungan publik tetapi juga dapat mampu merubah sikap dan perilaku masyarakat kearah yang direncanakan sesuai dengan tujuan. Program merupakan elemen utama yang perlu ada untuk membuat sebuah aktivitas. Beberapa aspek dijelaskan dalam program, yang menunjukkan bahwa setiap program sudah benar yaitu:

1. Tujuan aktivitas yang ingin diperoleh
2. Aktivitas yang dilakukan untuk menggapai tujuan
3. Peraturan dan tahapan – tahapan yang diikuti
4. Estimasi keuangan yang diperlukan
5. Menerapkan strategi.

Dengan perencanaan ini, seluruh jenis program akan menjadi lebih terstruktur dan lebih mudah dioperasikan.

Menurut Charles O. Jones, definisi program merupakan metode yang efektif dalam menggapai tujuan. Charles O Jones, pengertian program adalah cara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

yang disahkan untuk mencapai tujuan. Dapat membantu seseorang mengidentifikasi apakah aktifitas tersebut merupakan fitur khusus program dari program tersebut, yaitu:

1. Program seringkali membutuhkan personel, seperti implementasi atau berperan sebagai peserta program.
2. Program tentunya mempunyai keuangan sendiri, dan terkadang program juga ditentukan oleh keuangan.
3. Program mempunyai identitasnya sendiri, dan jika diimplementasikan secara efektif maka mampu dikenali oleh masyarakat.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan yaitu program terdapat bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling mendukung atau mencapai tujuan. Bagian program merupakan unsur pembentuk program yang saling berkaitan dan menjadi factor yang menentukan keberhasilan program. Pada setiap program komponennya berbeda – beda, karena komponen tersebut ditentukan sesuai dengan kompleksitas program yang sedang berjalan.

Program yang berkualitas adalah program yang berdasar pada model teoritis yang pasti yakni sebelum menetapkan permasalahan social yang akan diselesaikan dan mulai melaksanakan intervensi, perlu mempertimbangkan dengan sungguh – sungguh terlebih dahulu terkait bagaimana dan mengapa masalah itu terjadi dan apa yang menjadi solusi terbaik.

Menurut (Tachan, 2006) program dalam pelaksanaan kebijakan publik meliputi beberapa tahapan, antara lain:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Merancang program dan tugas yang jelas serta rinciannya, menentukan indikator kinerja yang jelas, biaya dan waktu.
2. Menjalankan (penerapan) program dengan menggunakan stuktur dan personel, keuangan, dan sumber daya lain, tahapan dan cara yang sesuai.
3. Mendirikan sistem jadwal, sistem pemantauan, dan fasilitas untuk memantau dan mengevaluasi (hasil) implementasi kebijakan dengan baik.

Program merupakan *planning* yang bersifat komprehensif yang sudah mendeskripsikan sumber daya yang akan digunakan serta terpadu pada satu kesatuan. Program mendeskripsikan target, kebijakan, prosedur, metode, standar, serta *budget*. Pikiran yang serupa dikemukakan oleh Siagian, program harus mempunyai ciri – ciri sebagai berikut:

1. Target yang dikendaki
2. Jangka waktu yang diharapkan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu
3. Besarnya biaya yang dibutuhkan beserta sumbernya
4. Jenis – jenis kegiatan yang dilaksanakan
5. Tenaga kerja yang dibutuhkan baik dicermati dari segi jumlahnya maupun dilihat dari sudut kualifikasi serta keahlian dan keterampilan yang diperlukan.

Menurut Rippley dan Franklin (Subarsono, 2005) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan program ditinjau dari tiga faktor, yaitu:

1. Perspektif kesesuaian yang mengukur implementasi dari kepatuhan aparatur pelaksana.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

2. Keberhasilan implementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan kurangnya masalah.

3. Implementasi yang berhasil mengarah pada kinerja yang memenuhi semua pihak, terutama kelompok penerima program.

Hal ini sejalan dengan pendapat Nakamura dan Smallwood (dalam Sujianto, 2008) yang mengemukakan bahwa ada tiga cara dominan untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan program, yaitu :

1. Perspektif yang menilai keberhasilan implementasi program dari aspek kebutuhan birokrat bawahan terhadap birokrat atasan, atau tingkat kepatuhan terhadap birokrasi secara umum terhadap mandate atau kebijakan yang dituangkan dalam undang – undang.
2. Keberhasilan program dalam hal berfungsinya prosedur rutin dalam implementasi program dan tidak adanya konflik.
3. Keberhasilan pelaksanaan program dilihat dari segi pencapaian tujuan tujuan programatis yang diharapkan dari dampak program.

Program terbaik di dunia adalah program yang didasarkan pada model teoritis yang jelas, yaitu sebelum menentukan masalah sosial yang ingin diatasi dan mulai melakukan intervensi, maka sebelumnya harus ada pemikiran yang serius terhadap bagaimana dan mengapa masalah itu terjadi dan apa yang menjadi motivasi terbaik.

2.3 Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja)

Program didefinisikan sebagai aplikasi dan sumber daya sistematis berdasarkan logika, kepercayaan, dan asumsi untuk mengidentifikasi kebutuhan,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keyakinan, dan faktor manusia yang terkait dengan apa yang disebutkan. Program ini termasuk dalam banyak kegiatan yang direncanakan dan sistematis, kehadiran sumber daya yang dikelola, kehadiran tujuan atau tujuan target, keberadaan kebutuhan spesifik, kehadiran partisipasi individu atau kelompok yang diidentifikasi, dan keberadaan kebutuhan konteks, Edisi terdokumentasi, generasi hasil dan efek, dan keberadaan sistem kepercayaan diimplementasikan dalam program kerja, dan memiliki keuntungan.

Menurut Arikunto dan Jabar (2009:3) dalam (Munthe, 2015) ada dua pengertian untuk istilah program, program dapat diartikan dalam arti khusus dan program dalam arti umum. Pengertian secara umum program adalah sebuah bentuk rencana yang akan dilakukan. Program apabila dikaitkan langsung dengan evaluasi program maka program diartikan sebagai unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Lebih lanjut Arikunto dalam (Munthe, 2015) mengatakan bahwa ada tiga pengertian penting dan perlu ditekankan dalam menentukan program, yaitu:

1. Realisasi atau implementasi suatu kebijakan,
2. Terjadi dalam waktu relative lama bukan kegiatan tunggal tetapi jamak berkesinambungan
3. Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program diartikan sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang dapat disebut sebagai sistem yang didalamnya terdapat rangkaian kegiatan yang dilakukan bukan hanya satu kali tetapi berkesinambungan.

Menurut Tayibnapis dalam (Munthe, 2015) program ialah segala sesuatu yang dicoba lakukan seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh. Menurut Widoyoko program diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang direncanakan dengan seksama dan dalam pelaksanaannya berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu dalam suatu organisasi yang melibatkan banyak orang.

Program dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau aktifitas yang terencana dengan sistematis untuk diimplementasikan dalam kegiatan nyata secara berkelanjutan dalam organisasi serta melibatkan banyak orang di dalamnya. Program Pemerintah yang menjadi fokus kajian penelitian yaitu Program Kebijakan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja) Berbasis Pertanian di Nagari Lansek Kadok Kabupaten Pasaman. Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian yang disebut program (Bekerja) adalah upaya peningkatan produksi komoditas pertanian untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan melalui kegiatan pertanian dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin.

Program bekerja merupakan upaya kementerian pertanian untuk mengentaskan kemiskinan di tanah air berbasis pertanian dengan tiga tahapan, jangka pendek, menengah, dan panjang. Bantuan dalam program Bekerja



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komoditasnya diarahkan berdasarkan keunggulan komparatif masing-masing daerah yang menghasilkan nilai ekonomis tinggi. Sasarannya difokuskan pada satu wilayah penduduk miskin yang dikelompokkan dalam 3 klaster. Setiap klaster, penduduk miskin berjumlah 5 hingga 10 ribu. Adapun jenis bantuan yang diberikan melalui program bedah kemiskinan rakyat sejahtera ini yaitu

1. Jenis bantuan jangka pendek dan menengah melalui dua jenis bantuan yaitu,
 - a. Sayur-sayuran beserta polybag dan
 - b. Bibit ayam petelur berumur dua bulan beserta kandang dan pakan.
2. Jenis bantuan jangka panjangnya melalui satu jenis bantuan yaitu,
 - a. Tanaman perkebunan sesuai dengan kondisi agro masing-masing daerah.

Adapun tujuan dari program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera adalah sebagai berikut:

- 1) Menjamin ketahanan pangan untuk kesehatan dan kecukupan gizi RTM melalui pengadaan pangan dari hasil produksi sendiri;
- 2) Menciptakan sumber pendapatan baru RTM melalui pembentukan usaha pertanian multi komoditas bernilai tinggi;
- 3) Meningkatkan produksi, nilai tambah, dan daya saing usaha pertanian melalui inovasi;
- 4) Meningkatkan kapasitas dan daya tawar RTM dengan mendirikan dan memberdayakan kelembagaan ekonomi petani;
- 5) Menumbuhkan kembangkan perekonomian lokal melalui pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. (Pedoman Program BEKERJA Th. 2018)



Pelaksanaan bantuan pemerintah untuk Program Bedah Kemiskinan

Rakyat Sejahtera dilakukan dengan tahapan:

- 1) penetapan penerima bantuan
- 2) pengadaan
- 3) penyaluran
- 4) pendampingan.

Upaya efektifitas penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah salah satunya pemerintah berupaya untuk mencapai tujuan dalam penuntasan permasalahan tersebut salah satunya mensejahterakan masyarakat melalui program pengentasan kemiskinan. Berbagai perencanaan, kebijakan serta program pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan pada intinya adalah mengurangi jumlah penduduk miskin dan salah satu programnya adalah dengan program BEKERJA ini.

2.4 Pandangan Islam Terhadap Implementasi Kebijakan

Dalam surat An-Nisa ayat 58 di jelaskan

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat," (QS An-Nisa': 58). ("Jateng.Nu.or.Id/Keislaman," n.d.)

Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebut dua perkara terkait ayat ini. Pertama, obyek (khitab) ayat ini adalah para pemangku kekuasaan, Nabi ﷺ, khalifah setelahnya dan para pemimpin setelahnya. Kedua, ayat ini mengandung pokok-pokok hukum yang menjadi tanggung jawab pemimpin berupa amanah kekuasaan atas harta benda, penegakan hukum, perlindungan dan advokasi terhadap kezaliman yang menimpa rakyat. (Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari, Al-Jami' li Ahkamil-Qur'an.

Dua pokok dasar prinsip penyelenggaraan sistem pemerintahan yang diisyaratkan oleh ayat ini, yakni amanah dan adil. Amanah yang dibebankan rakyat dari sebuah proses politik tidak hanya sebuah kontrak politik yang berdimensi keduanian karena dalam pandangan Al-Qur'an, kepemimpinan sebagai 'perjanjian ilahi' yang melahirkan tanggung jawab menentang kezaliman dan menegakkan keadilan.

Inti dari aturan ini adalah pemerintah sebagai kader, dan otoritas tidak hanya dalam masalah ini tetapi juga dalam hukum sebagai bentuk tanggung jawab bagi mereka yang memiliki pedoman yang lebih baik untuk menolak dan merusak Dalar, untuk menarik manfaat dan kebenaran otoritas tertentu. Pemerintah tidak membenarkan membuat kebijakan yang baik jika kebijakan yang lebih baik dapat diimplementasikan untuk

menciptakan sumur yang adil dan rasa aman dengan layanan untuk rakyat.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu usaha untuk mencari serta melakukan peninjauan ulang penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian yang dimaksud dalam hal ini merupakan penelitian yang memiliki kesamaan kajian dengan penelitian yang saat ini dilakukan. Hal tersebut bertujuan sebagai referensi serta titik acuan dalam penelitian sehingga tidak dijumpai kesamaan. Adapun penelitian terdahulu dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama/ Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan penelitian penulis
1	Dewi Pratamasari, dkk/2019	Studi Kasus-Kontrol pada Rumah Tangga Miskin Penerimaan ayam Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (#Bekerja) di Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga Tahun 2018	Penelitian ini berangkat dari latar belakang masalah bahwa dalam perjalanan kegiatan #BEKERJA telah dilaporkan adanya beberapa kasus kematian ayam dalam jumlah tertentu dalam waktu 1-2 bulan setelah ayam diterima RTM. Namun, jumlah kematian yang dilaporkan belum jelas apakah hanya disebabkan oleh penyakit unggas, atau disebabkan oleh faktor lain seperti ayam dijual, atau dipotong tanpa laporan ke petugas setempat (Desa/Kabupaten) kemudian dilaporkan sebagai kematian. Disamping itu juga belum diketahui faktor-faktor risiko	Perbedaannya terletak pada objek penelitiannya, penelitian tersebut dilakukan untuk melihat studi kasus-kontrol rumah tangga miskin penerima ayam program BEKERJA di Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

No

Nama/
Tahun
Penelitian

Judul Penelitian

Hasil Penelitian

Perbedaan dengan
penelitian penulis

1. Diteliti

2. Diteliti

Soleh
Suharsono,
Bashori
Muchsin,
Afifuddin
/2019

Implementasi
Kebijakan Program
Nasional
Pemberdayaan
Masyarakat Dalam
Upaya
Meningkatkan
Ekonomi Produktif
(Studi Kasus
Program Pnpm Di
Kelurahan
Tlogomas
Kecamatan
Lowokwaru Kota
Malang)

yang kemungkinan berperan
dalam terjadinya kematian
atau kasus penyakit. Oleh
karena itu, BBVet Wates
melakukan monitoring
kesehatan ayam #Bekerja
dengan menggunakan
pendekatan studi kasus-
kontrol di beberapa
kecamatan di Kabupaten
Banyumas dan Purbalingga.

Berdasarkan hasil penelitian
ini dapat disimpulkan bahwa
sebagian besar KSM yang
menerima bantuan modal
mampu meningkatkan
penghasilannya, mampu
meningkatkan taraf
kesejahteraan sosial dan
ekonomi. Namun tidak
menutup kenyataan bahwa
bantuan yang disalurkan
dalam program PNPM
tersebut masih belum
memberikan dampak yang
besar pada sebagian kecil
KSM dalam membantu
meningkatkan usahanya. Hal
ini disebabkan jenis usaha
yang dilakukan oleh KSM
masih dalam taraf usaha
kecil, adanya kesulitan KSM
untuk memasarkan hasil
usaha, dan kurangnya
kemampuan sumber
daya manusia yang ada dalam
KSM tersebut untuk
mengembangkan usahanya.

Perbedaan pada
penelitian ini yaitu
Program ini dapat
memberikan
kontribusi dalam
meningkatkan
kemampuan usaha
dan pengembangan
usaha produktif KSM,
sedangkan yang
peneliti teliti yaitu
bagaimana
implementasi
kebijakan program
Bekerja dalam
menjamin ketahanan
pangan masyarakat.

3

Aziz
Ahmadi
dan Sri
Hartati/201
9

Penerapan Fuzzy
C-Means Dalam
Sistem Pendukung
Keputusan Untuk
Penentuan

PNPM Mandiri Perdesaan
adalah program untuk
mempercepat
penanggulangan kemiskinan
secara terpadu dan

Perbedaan pada
penelitian ini yaitu
terletak pada
kriterianya. Kriteria
kelayakan digunakan

No	Nama/ Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan penelitian penulis
			kompeten karena sebelumnya tidak diberi pelatihan	

Sumber : *Olahan Peneliti, 2024*

Berdasarkan uraian tabel penelitian terdahulu diatas, peneliti menemukan persamaan penelitian ini dengan semua penelitian terdahulu jika dikaitkan dengan lima penelitian yang terdapat pada table diatas terdapat kesamaan dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti salah satunya yaitu pada objek penelitian, yakni sama-sama meneliti mengenai program BEKRJA. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan semua penelitian terdahulu terdapat berbagai macam perbedaan yaitu pada kajian lokus, fokus, dan teori. Dimana fokus penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan program bedah kemiskinan rakyat sejahtera berbasis pertanian, selanjutnya lokusnya dilakukan di Nagari Lansek Kadok Kabupaten Pasaman dan teori yang digunakan dalam penelitian ini oleh Charles O. Jones yang terdiri dari beberapa indikator yaitu interpretasi, pengorganisasian, dan penerapan atau aplikasi.

2.6 Definisi Konsep

Definisi Konsep merupakan batasan dalam penelitian, guna menghindari kesalahpahaman penafsiran serta mengarahkan penelitian dalam melakukan. Definisi Konsep adalah konsep secara jelas mengenai variable – variable penelitian untuk memberikan hasil penelitian yang seragam pada semua pengamat (Purwanto, 2007). Definisi Konsep juga menjelaskan tentang bagaimana kegiatan yang harus dilakukan untuk memperoleh indikator yang dimaksud (Zainuddin,

2008). Maka penulis mengoperasionalkan beberapa indikator yang berhubungan dengan penelitian sebagai berikut:

a. Implementasi

Implementasi merupakan suatu kegiatan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah diatur dan disusun secara matang serta terperinci untuk mencapai tujuan suatu kegiatan. Pada intinya implementasi dapat dilakukan bila sudah terdapat rencana atau konsep kegiatan yang hendak dilakukan.

b. Program

Program merupakan penjabaran dari suatu rencana, dalam hal ini program merupakan bagian dari perencanaan dan diartikan sebagai kerangka dasar dari pelaksanaan suatu kegiatan. Sebuah program dalam pelaksanaan kebijakan publik diharapkan menghasilkan sesuatu dalam penyelesaian masalah lingkungan publik dan juga mampu merubah sikap serta perilaku masyarakat kearah yang direncanakan sesuai dengan tujuan.

c. Interpretasi

Interpretasi merupakan aktivitas penjelasan substansi dan suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami, sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan. Interpretasi berarti bagaimana agar apa yang menjadi kebijakan dan tujuan dapat dimengerti dan dipahami secara jelas sehingga dapat terwujud dan terealisasi. Implementor harus mengerti dan paham apa yang harus mereka lakukan agar tidak terjadi kebingungan dan kekeliruan akan pelaksanaan suatu program atau kebijakan. Pelaksana harus paham baik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah substansi program atau kebijakan, makna serta tujuan dari program tersebut agar tidak menyimpang dari tujuan awal.

d. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan suatu upaya menetapkan dan menata kembali sumber daya, unit-unit dan metode-metode yang mengarah pada upaya mewujudkan (merealisasikan kebijakan menjadi hasil sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan). Organisasi dalam konteks implementasi adalah aktivitas yang paling utama yang akan membentuk unit atau metode yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau program. Organisasi merupakan suatu kesatuan orang – orang yang melakukan tugas dan fungsinya dalam ruang lingkup administrasi. Dimana tujuan organisasi adalah menjelaskan program yang telah dirancang. Dalam aktivitas organisasi aspek – aspek yang harus ada dan tersedia dalam implementasi mencakup perintah yang jelas, sumber daya manusia, sumber daya anggaran, serta fasilitas pendukung suatu program. Dimensi organisasi juga mencakup kegiatan birokrasi yang menopang suatu kegiatan berjalan, komunikasi serta koordinasi dalam menjalankan suatu program.

e. Penerapan/aplikasi

Penerapan / aplikasi merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ada.

Aplikasi merupakan penerapan secara rutin dari segala keputusan dan aturan dengan melakukan segala aktivitas agar tercapai tujuan dari kebijakan awal.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Proses penerapan atau aplikasi ini merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana harus diarahkan pada pedoman - pedoman dalam menjalankan program. Dalam aplikasi suatu kebijakan atau program, pelaksanaannya juga harus memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, dan objektivitas. Dalam pengaplikasian pun pelaksana dituntut untuk memiliki strategi yang tepat, mampu mengelola aktivitas kegiatan, serta antisipasi pihak yang dirugikan.

f. Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja)

Program ini diartikan sebagai aplikasi sistematis dan sumber daya yang di dasarkan pada logika, keyakinan, dan asumsi identifikasi kebutuhan manusia dan faktor-faktor yang berhubungan dengan hal-hal yang sudah disebutkan. Program juga disebut sebagai hal yang termasuk di dalamnya serangkaian kegiatan sistematis yang direncanakan, adanya sumber daya yang dikelola, adanya sasaran target atau tujuan, adanya kebutuhan yang spesifik, diidentifikasi, adanya partisipasi individu atau kelompok, adanya konteks tertentu, menghasilkan *output* terdokumentasi, hasil, dan dampak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.7 Konsep Operasional

Tabel 2. 2 Konsep Operasional

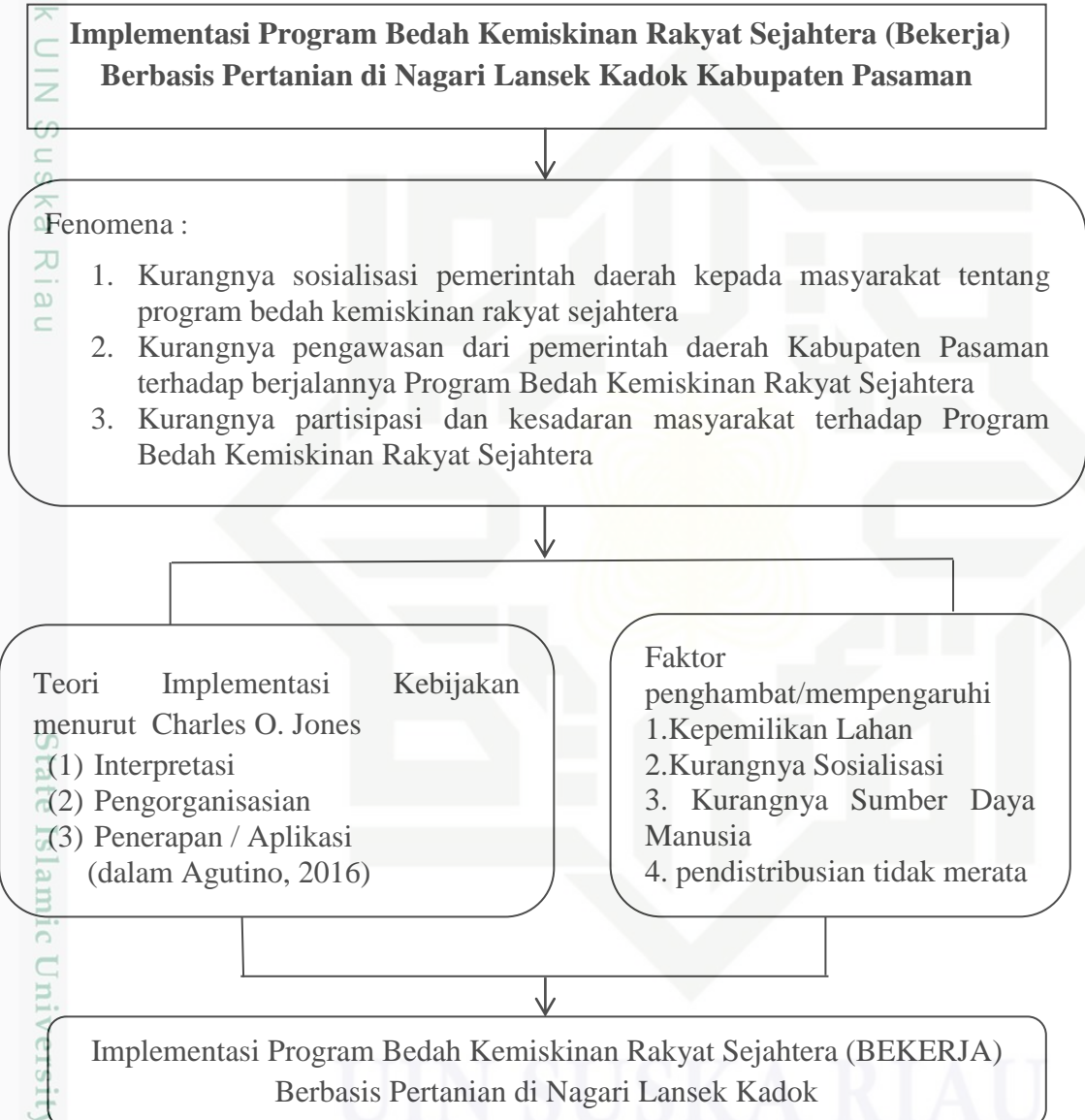
No.	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1.	Implementasi Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian	Interpretasi	1. Kebijakan 2. Komunikasi Kebijakan 3. Konsistensi Kebijakan
		Pengorganisasian	1. Struktur Orgnisasi 2. Sumber Daya 3. Koordinasi Antar Lembaga
		Penerapan/Aplikasi	1. Prosedur Operasional 2. Monitoring dan Evaluasi 3. Penyesuaian Kebijakan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8 Kerangka Berfikir

Adapun kerangka berfikir dari penelitian ini yaitu dengan menggunakan teori Implementasi Charles O.Jones adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir

Sumber : Olahan Peneliti, 2024



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan suatu metode yang digunakan untuk membuat gambaran secara sistematis mengenai hubungan antara fenomena yang diselidiki dan hasilnya tidak dinyatakan dalam bentuk angka. (Sugiyono, 2009)

Penelitian dilakukan untuk mendeskripsikan dan mengidentifikasi kondisi yang terjadi saat penelitian dan berupaya menemukan data-data berupa fakta-fakta tersebut secara utuh dan semaksimal mungkin. Hal ini sesuai dengan pendapat Bodgan dan Taylor, metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. (Moleong, 2002)

Metode penelitian dibutuhkan agar penelitian dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang diharapkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, penelitian dilakukan untuk memahami berbagai fenomena baru yang diperlukan ilmu pengetahuan melalui penelitian dengan metodologi yang tepat.

Metode penelitian deskriptif ialah pencarian fakta interpretasi yang sesuai. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang hubungan, kegiatan, sikap, sudut pandang, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena.

Penelitian ini juga dapat memberikan gambaran yang nyata tentang bagaimana keadaan dilapangan sesungguhnya. Dalam metode deskriptif juga tidak membatasi pengumpulan data, analisis maupun interpretasi dari data tersebut. Kemahiran peneliti untuk melakukan observasi dan wawancara juga sangat dituntut dalam menentukan data yang akan diperolehnya.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman. Penelitian ini dilakukan karena daerah tersebut merupakan salah satu Nagari yang menjalankan Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera. Selain itu daerah ini juga merupakan salah satu daerah yang masyarakatnya masih berpenghasilan rendah dibandingkan daerah yang lainnya dan juga daerah ini mayoritas penduduknya adalah sebagai petani. Pengentasan kemiskinan saat ini menjadi perhatian karena sebaran kemiskinan sebagian besar berada di wilayah pedesaan dengan mata pencaharian pertanian. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di daerah tersebut.

3.3 Informan Penelitian

Pemilihan informan dilakukan oleh metode tertentu yang bertujuan untuk menjangkau sebanyak mungkin informasi dan berbagai sumber dan menggali informasi yang menjadi dasar penulis laporan. Oleh karena itu, pengambilan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling, yaitu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menentukan informasi dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal. (Sugiyono, 2014)

Informan yang diambil dalam penelitian ini adalah orang-orang yang mengetahui dengan baik dan banyak tentang informasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian mengenai Implementasi Kebijakan program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja) informan penelitiannya adalah:

Tabel 3. 1 Informan Penelitian

No	Jabatan	jumlah
1	Dinas Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura	1
2	Dinas Bidang Pertanian dan Peternakan	1
3	Wali Nagari (kepala desa) Lansek Kadok	1
4	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	1
5	Masyarakat Nagari Lansek Kadok	3

Sumber : Olahan peneliti, 2024

3.4 Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari informan penelitian melalui wawancara yang dilakukan untuk mendapat informasi yang terkait dengan Implementasi Kebijakan Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja) di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan. Instanti yang terkait dengan program ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, aparat Wali Nagari serta melibatkan partisipasi masyarakat. Dan dari hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti dilapangan yaitu berupa keterangan-



keterangan langsung dari informan yang menerima langsung bantuan program tersebut dan data-data bantuan apa saja yang diterima.

b. Data Sekunder

Merupakan bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dan digunakan sebagai informasi pendukung dalam analisis data primer. Data yang diperoleh untuk melengkapi data primer diperoleh secara langsung melalui buku, arsip dan dokumen-dokumen segala bentuk informasi yang bersifat menunjang dan mendukung penelitian tentang Implementasi Kebijakan Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja) Berbasis Pertanian di Nagari Lansek Kadok Kabupaten Pasaman antara lain yaitu :

1. Profil Nagari Lansek Kadok
2. Peraturan Perundang – undangan
3. Data penerimaan bantuan
4. Serta dokumen pendukung lainnya

3.5 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai. Wawancara adalah teknik pengumpulan data kualitatif dengan menggunakan instrument yaitu pedoman wawancara.



Jenis wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur, artinya wawancara ini menggunakan daftar pertanyaan (pedoman wawancara) yang telah disusun sebelumnya sesuai dengan tujuan penelitian. Wawancara ini akan dilakukan dengan informan yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam Implementasi Kebijakan Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja) di Nagari Lansek Kadok Kabupaten Pasaman.

b. Observasi

Teknik observasi adalah suatu teknik atau cara untuk mengumpulkan data dengan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti dengan menggunakan panca indra agar dapat diambil data yang actual dan nyata. Teknik ini diambil untuk membuktikan kebenaran apa yang dikatakan oleh informan karena seringkali apa yang dikatakan seringkali berbeda dengan apa yang orang itu kerjakan.

Menurut (Moleong, 2007) pengamatan mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tidak sadar, kebiasaan, dan sebagainya. Dengan observasi kita dapat melihat, mendengar, dan merasakan apa yang sebenarnya terjadi. Data observasi dapat berupa data factual, cermat dan terperinci tentang keadaan lapangan. Observasi dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan perilaku yang nyata dan wajar sehingga apa yang diharapkan dari tujuan penelitian ini benar-benar maksimal.

c. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

monumental dari seseorang. Dalam hal ini peneliti mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan fokus permasalahan yang diteliti yaitu mengenai implementasi kebijakan program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja) di Nagari Lansek Kadok Kabupaten Pasaman. Teknik ini digunakan untuk mempertajam dan memperkuat data yang telah peneliti peroleh dilapangan. Dan hasil temuan yang didapatkan peneliti dilapangan dalam bantuan program implementasi kebijakan program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja) di Nagari Lansek Kadok dalam bentuk dokumentasi yaitu berupa kandang ayam serta lahan perkarangan bantuan program Bekerja.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif karena dapat dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Aktivitas dalam analisis data dikemukakan oleh Miles dan Huberman, 1984 (Sugiyono, 2014) yaitu:

Dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data bergerak dari lapangan dalam upaya membangun teori dari data. Proses pengumpulan data ini diawali dengan memasuki lokasi penelitian. Dalam hal ini peneliti mendatangi lokasi penelitian dengan membawa izin formal penelitian, kemudian dilanjutkan dengan menemui orang-orang yang ditargetkan sebagai informan penelitian. Pada proses selanjutnya baru dilakukan pengumpulan data dengan teknik wawancara dan studi dokumentasi untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan lengkap.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan semakin kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema polanya. Dalam penelitian ini, peneliti menyeleksi dan merangkum data yang diperoleh lalu difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja) Berbasis Pertanian di Nagari Lansek Kadok Kabupaten Pasaman.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman dalam (Moleong, 2013) menyatakan bahwa yang paling sering menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan/verifikasi

Miles dan Huberman dalam (Moleong, 2013) menyatakan bahwa kesimpulan awal yang dikemukakan dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Rumusan masalah dalam

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

Dalam penelitian ini, maka dalam proses penilaian implementasi program Bekerja dinagari Lansek Kadok Kabupaten Pasaman penelitian ini menggunakan teori implementasi Charles O. Jones yang mempunyai tiga komponen dalam mengoperasikan program yaitu interpretasi, pengorganisasian, dan penerapan/aplikasi.



BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Pasaman

Kabupaten Pasaman merupakan salah satu kabupaten yang terletak di bagian utara Provinsi Sumatera Barat, dengan ibu kota di Lubuk Sikaping. Kabupaten ini pernah berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Perjuangan melawan penjajahan Belanda dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol, yang terkenal dengan Perang Paderi yang berlangsung dari tahun 1821 hingga 1830. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Pasaman secara resmi menjadi kabupaten di Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 8 Agustus 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati.

Kabupaten Pasaman adalah salah satu dari 19 kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat, dengan luas wilayah mencapai 4.447,63 km², yang setara dengan 10,44% dari total luas Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten ini terdiri dari 12 kecamatan, 37 nagari, dan 225 jorong. Pada tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Pasaman tercatat sebanyak 313,84 ribu jiwa. Secara geografis, Kabupaten Pasaman dilintasi oleh garis Khatulistiwa dan terletak antara 0°55' LU hingga 0°06' LS dan 99°45' hingga 100°21' BT. Ketinggian wilayah Kabupaten Pasaman bervariasi antara 50 meter hingga 2.240 meter di atas permukaan laut. Mayoritas penduduk Kabupaten Pasaman berasal dari suku Minang, dengan beberapa di antaranya juga berasal dari suku Mandailing.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara Geogarfi Kabupaten Pasaman berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Mandailing Natal dan Kabupaten Padang Lawas (Provinsi Sumatera Utara)
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Agam
- c) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lima Puluh Kota dan Rokan Hulu (Provinsi Riau)
- d) Sebelah Barat Bebatasan dengan Kabupaten Pasaman Barat dan Mandailing Natal (Provinsi Sumatera Utara).

Kata "Pasaman" berasal dari Gunung Pasaman. Istilah ini diambil dari bahasa Minangkabau yang berarti "persamaan." Makna ini merujuk pada keberagaman (Heterogen) masyarakat yang tinggal di Kabupaten Pasaman.

Kabupaten Pasaman terdiri dari 12 kecamatan, yaitu sebagai berikut:

Kecamatan Bonjol, Kecamatan Duo Koto, Lubuk Sikaping, Panti, Mapat Tunggul Selatan, Mapat Tunggul, Padang Gelugur, Rao, Rao Selatan, Rao Utara, Simpang Alahan Mati dan Tigo Nagari.

4.2 Gambaran Umum Nagari Lansek Kadok

a. Sejarah Nagari Lansek Kadok

Nagari Lansek Kadok adalah sebuah kampung tua yang berada di Kabupaten Pasaman. Berdasarkan sejarah yang diyakini oleh masyarakat setempat, Nagari Lansek Kadok telah ada sejak abad ke-14 Masehi dan informasi ini telah diwariskan secara turun-temurun.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut sejarah, daerah Rao atau Kerajaan Rao yang terletak di sebelah Jalan Sungai Proyek Tanjung Air, yang saat ini sedang digali oleh Dinas Pariwisata Sumatera Barat, merupakan kawasan rawa-rawa (bukan Kecamatan Rao yang ada sekarang). Pada masa itu, masyarakat yang tinggal di daerah rawa tersebut berada di dataran tinggi atau perbukitan. Dari daerah tersebut, mereka turun untuk mencari dataran rendah, dan di dataran rendah itu terdapat sebatang pohon lansek (lansat) yang tumbuh berdekatan dengan pohon dodok (dadap). Meskipun tidak dalam musim berbuah, pohon lansek tersebut sering (kodok) kali berbuah. Di sinilah rumah pertama kali didirikan.

Seiring berjalannya waktu, semakin banyak rumah yang dibangun di area tersebut, dan masyarakat pun berkembang biak. Akhirnya, terbentuklah sebuah kampung yang dinamakan "Lansek Kadok." Dari segi etimologi, nama Lansek Kadok berasal dari kata "lansek" yang berarti lansat dan "kodok" yang berarti sering.

Di Nagari Lansek Kadok terdapat Kerapatan Adat Nagari yang relevan, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983 mengenai Nagari. Kerapatan ini berfungsi sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1979 di Sumatera Barat mengubah kedudukan Nagari, yang tidak lagi dianggap sebagai unit pemerintahan terendah di Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat, melainkan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Fungsi dan tugas Kerapatan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Adat Nagari (KAN) diatur secara rinci dalam Peraturan Daerah No. 13 Tahun 1983 yang pernah berlaku. Dalam Pasal 3 ayat (1) Perda No. 13 Tahun 1983, diatur mengenai fungsi Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat sebagai berikut:

1. Mendukung pemerintah dalam memastikan kelancaran pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor, khususnya dalam bidang sosial masyarakat dan budaya.
 2. Mengurus urusan hukum adat dan adat istiadat dalam Nagari
 3. Memberikan status hukum berdasarkan hukum adat terkait dengan aspek-aspek yang berkaitan dengan harta kekayaan masyarakat nagari, demi kepentingan hubungan keperdataan adat, serta dalam hal terjadinya perselisihan atau sengketa adat.
 4. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat Minangkabau untuk memperkaya, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan nasional secara umum, serta kebudayaan Minangkabau secara khususnya.
 5. Menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan Nagari untuk kesejahteraan masyarakat Nagari. (Statistik Daerah Kecamatan Rao Selatan 2016, 2019)
- b. Visi dan Misi Nagari Lansek Kadok
1. Visi Nagari Lansek Kadok
 “Mewujudkan Nagari Lansek Kadok yang maju dengan mengandalkan SDM dan SDA yang tersedia”.
 2. Misi Nagari Lansek Kadok



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- a) Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab;
- b) Meningkatkan kualitas keimanan dengan pembinaan keagamaan yang berkelanjutan;
- c) Mewujudkan kemandirian nagari dalam pemenuhan kebutuhan pokok, pangan, dan kesehatan;
- d) Memberdayakan fungsi dan penguatan kelembagaan nagari yang ada;
- e) Memajukan sarana dan prasarana pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan dan kehutanan.

c. Wilayah Geografis Nagari Lansek Kadok

Nagari Lansek Kadok terletak antara koordinat 00°37' - 00°28' Lintang Utara dan 99°58' - 100°08' Bujur Timur. Dengan ketinggian antara 252 sampai dengan 1:100 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah Nagari Lansek Kadok adalah 338,98 km² dari luas kabupaten pasaman yang dimana yaitu 3.947,63 km².

Lansek Kadok merupakan nama sebuah Nagari yang berada di wilayah hukum Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, dan terletak di Jalan Medan-Padang. Masyarakat di Nagari Lansek Kadok memiliki dua pandangan adat, yaitu adat Minangkabau dan Batak, namun mereka hidup dalam suasana yang aman dan damai. Selain itu, Nagari Lansek Kadok juga memiliki batasan wilayah yaitu:

- a) Sebelah utara berbatasan dengan nagari tarung-tarung kec. Rao;
- b) Sebelah timur berbatasan dengan nagari selayang kec. Mapat Tunggul Selatan;
- c) Sebelah selatan berbatasan dengan nagari tanjung betung kec. Rao Selatan;



d) Sebelah barat berbatasan dengan nagari simpang tonang kec. Duo Koto.

Secara administratif, Nagari Lansek Kadok terbagi menjadi 5 (lima) kejurongan, di mana setiap kejurongan memiliki beberapa kampung yaitu: Kotanopan Setia, Rambahan, Beringin, Kota Panjang, dan Lansek Kadok.

d. Perekonomian Nagari

Jika dilihat dari jenis mata pencaharian masyarakat di Nagari Lansek Kadok, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman, Sumatra Barat, informasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 1 Keadaan Ekonomi Masyarakat Nagari Lansek Kadok Kabupaten Pasaman 2024

No	Profesi	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Petani	5.943	57 %
2.	Buruh Tani	940	9 %
3.	PNS/POLRI/TNI	239	2 %
4.	Peternak	2.845	28%
5.	Montir	160	1%
6.	Tukang Batu	144	1%
7.	Tukang Kayu	120	1%
8.	Tukang Sumur	88	1%
	Jumlah	10.479	100%

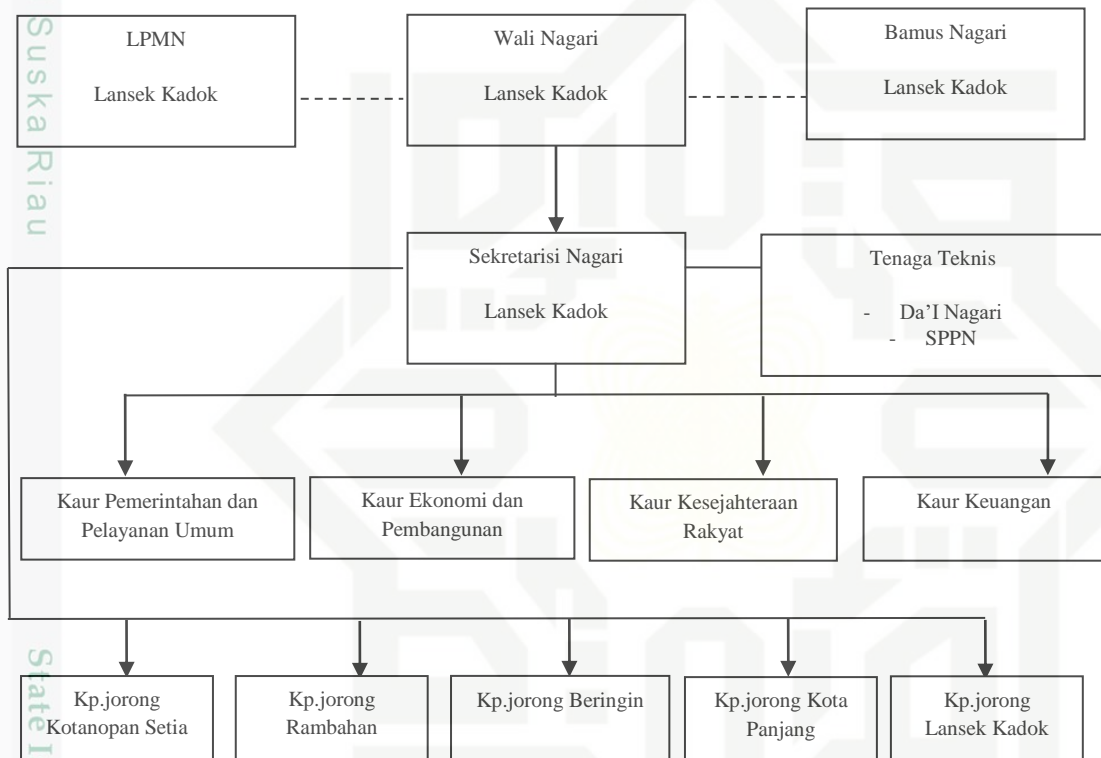
Sumber: kantor wali nagari Lansek Kadok 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pekerjaan utama masyarakat di Nagari Lansek Kadok, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman, Sumatra Barat, adalah sebagai petani.

e. Bagan Struktur Organisasi Nagari Lansek Kadok



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Nagari Lansek Kadok

Sumber: kantor wali nagari Lansek Kadok 2024

4.3 Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman

a. Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian

Dinas Pertanian merupakan salah satu dari unit kerja yang ada dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2016 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan di bidang Pertanian dan sesuai dengan PERBUP Nomor 40 tahun 2016 tentang penjabaran Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Dinas Pertanian merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pertanian.

b. Fungsi

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, maka fungsi Dinas Pertanian adalah:

Perumusan kebijakan teknis dibidang tanaman pangan dan hortikultura, sarana dan prasarana, peternakan dan kesehatan hewan, penyuluhan dan perkebunan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang tanaman pangan dan hortikultura, sarana dan prasarana, peternakan dan kesehatan hewan, penyuluhan dan perkebunan, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pertanian yang meliputi tanaman pangan dan hortikultura, sarana dan prasarana, peternakan dan kesehatan hewan, penyuluhan dan perkebunan, pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT), pengelolaan urusan ketatausahaan dinas; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.



c. Visi dan Misi Dinas Pertanian

1. Visi Dinas Pertanian

“Terwujudnya Petani Kabupaten Pasaman yang Sejahtera, Mandiri dan Berorientasi Agribisnis”

2. Misi Dinas Pertanian

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Petani, Meningkatkan Produktivitas Hasil Pertanian, Melaksanakan perbaikan sistem pertanian yang berorientasi Agribisnis, Meningkatkan pelayanan kesehatan hewan dan Meningkatkan ketersediaan Sarana dan Prasarana Pertanian.

d. Susunan Organisasi

Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama. Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator. Kepala bidang pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator. Kepala Subbagian, Kepala Seksi pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas. Kepala unit pelaksana teknis pada Dinas Tipe C merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai Implementasi Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja) Berbasis Pertanian di Nagari Lansek Kadok Kabupaten Pasaman maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA) berbasis pertanian di Nagari lansek Kadok Kabupaten Pasaman telah dilaksanakan, namun belum mencapai hasil yang optimal. Hal ini disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan dan kebijakan pemerintah daerah yang berlaku.
2. Faktor penghambat/memengaruhi dalam Implementasi Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja) Berbasis Pertanian di Nagari Lansek Kadok Kabupaten Pasaman adalah kepemilikan lahan, kurangnya sosialisasi, kurangnya sumber daya manusia, dan pendistribusian bantuan tidak merata.
3. Masih banyaknya kendala dalam pemberian bantuan, kurangnya partisipasi masyarakat dalam program tersebut, tata cara prosedur dalam pengelolaan bantuan yang telah diberikan kepada para penerima bantuan, dan masih terhambatnya proses dalam pengambilan solusi dengan cepat, serta masih banyaknya kekurangan tenaga ahli dilapangan dalam cara memberikan bimbingan teknis kepada para penerima bantuan tersebut.



6.2

Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan kepada Dinas Pertanian sebagai koordinator dari program ini untuk diterapkan agar dapat lebih baik lagi, yaitu :

Pertama, diharapkan agar sosialisasi mengenai program ini kepada masyarakat dapat ditingkatkan, sehingga mereka dapat memahami maksud dan tujuan dari Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja). Dengan demikian, diharapkan partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap program ini juga akan meningkat.

Kedua, diharapkan sumber daya manusia yang menjalankan program ini dapat ditambah dan disediakan dengan jumlah wilayah dan masyarakat yang ada.

Ketiga, diharapkan dari dinas terkait untuk selalu mendampingi dan mengawasi saat program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA) ini saat dilakukan dilapangan serta menambah jumlah TKSK yang turun kelapangan.

Dan yang terakhir, pelaksanaan program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA) perlu disertai dengan kegiatan evaluasi dan monitoring secara berkala guna mengidentifikasi hambatan serta merumuskan perbaikan yang dibutuhkan dalam implementasi program. Dengan adanya evaluasi yang menyeluruh, diharapkan pelaksanaan pelaksanaan program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA) dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriansyah, A., Alexandri, M. B., & Halimah, M. (2021). Implementasi Kebijakan Perencanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung. *Responsive*, 4(1), 13. <https://doi.org/10.24198/responsive.v4i1.34108>
- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Cetakan 2). Bandung: Alfabeta, 2008.
- Aneta, A. (2012). Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 54. <https://doi.org/10.26858/jiap.v1i1.132>
- D, R. N. (2006). *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara berkembang* (JIPUPON). Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Gaffar, A. (2009). *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi* (Cetakan V). Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Hasibuan, M. S. P. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara.
- Indiahono, D. (2009). *Kebijakan Politik Berbasis Dynamic Policy Analysis* (Cetakan 1). Yogyakarta: Gavamedia, 2009.
- Ishak, A., Budiyo, S., Sudamansyah, Emlan, F., Jhon, F., & Harwi, K. (2022). Efektivitas Sosialisasi terhadap Peningkatan Pengetahuan Penyuluh Pertanian tentang PermenpanRB 35/2020 di Kabupaten Bengkulu Selatan. *AgriHumanis: Journal of Agriculture and Human Resource Development Studies*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.46575/agrihumanis.v3i1.127>
- jateng.nu.or.id/keislaman. (n.d.). <https://Jateng.Nu.or.Id/Keislaman/Penjelasan->

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kaidah-Kebijakan-Pemerintah-Harus-Berdasar-Kemaslahatan-EwcWJ.

<https://jateng.nu.or.id/page/kontak-kami>

Lewis, O. (1966). Status Crystallization and Mobility Lock: The Poverty Production Process. *Advances in Applied Sociology, Vol.9.*

Media Auditor Edisi 48-September 2018 tentang Tata Kelola Bantuan Pemerintah Sektr Pertanian. (2020). Media Auditor Edisi 48-September 2018 tentang Tata Kelola Bantuan Pemerintah Sektr Pertanian. *Buletin Jendela Data Dan Informasi Kesehatan, 29–33.*
<https://maluku.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/laporan/laporan-tahunan>

Michael P. Todaro, S. C. S. (2006). *Economic Development* (D. Barnadi, S. Saat, & W. Hardani (Eds.); Kesembilan). Erlangga, 2006.

Moleong, L. J. (2002). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.

Munthe, A. P. (2015). PENTINGYA EVALUASI PROGRAM DI INSTITUSI PENDIDIKAN: Sebuah Pengantar, Pengertian, Tujuan dan Manfaat. *Scholaria : Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan, 5(2), 1.*
<https://doi.org/10.24246/j.scholaria.2015.v5.i2.p1-14>

Pasolong, H. (2007). *TEORI ADMINISTRASI PUBLIK* (Cetakan 9). Bandung: Alfabeta, 2019.

Pedoman Program BEKERJA Th. 2018. (2018). *Pedoman Program BEKERJA Th. 2018.*

Permatasari, K. I. (2015). Policy Implementation of Working Procedures of

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Information and Documentation Officer At Cimahi City. *Jurnal Bina Praja*, Volume 7 N, 319–325.

PERMENTAN RI NO. 14 Th 2019. (2019). 4(1), 1–23.

Purwanto. (2007). *Instrumen penelitian sosial dan pendidikan : pengembangan dan pemanfaatan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007.

Situmorang, N. B., Thamrin, M. H., & Nadjib, A. (2021). Successful Approach Implementasi Talent Mapping: Studi pada PFA di BPKP. *Matra Pembaruan*, 5(1), 39–51. <https://doi.org/10.21787/mp.5.1.2021.39-51>

Statistik Daerah Kecamatan Rao Selatan 2016. (2019). Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman, Statistik Daerah Kecamatan Rao Selatan 2016, (Pasaman: BPS Pasaman, 2016). *Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman*, 11(1), 1–14.

<http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484>

Subarsono, A. (2005). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi* (Cetakan 1). YOGYAKARTA : Pustaka Pelajar, 2005.

Sugiyono. (2009). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi* (Cetakan 6). Bandung: Alfabeta, 2014.

Sujianto. (2008). *Implementasi kebijakan publik: konsep, teori, dan praktik*. Alaf Riau bekerjasama dengan Program Studi Ilmu Administrasi (PSIA)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pascasarjana, Universitas Riau, 2008.

Susanti, M., & Wahyudi, T. (2020). (2020). Faktor Penghambat Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat di Daerah Tertinggal. *Jurnal Administrasi Publik*, 45–58.

Tachan. (2006). *Implementasi kebijakan publik*. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) (Bandung).

Tahir, A. (2011). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* (H. Hadjarati (Ed.); Cetakan 1). Jakarta Pustaka Indonesia Press.

Tahir, A. (2019). Kebijakan publik dan good governancy. *Academia Education*, 1–174.

Tjokroamidjojo, B. (1984). *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta : Gunung Agung.

Wahab, S. A. (2015). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* (Cetakan 1). Jakarta : Bumi Aksara., 2015.

Wibawa, S. (1994). *Evaluasi kebijakan publik* (Cetakan 1). Jakarta: Raja Grasindo Persa.

Zainuddin, M. dan M. (2008). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, Teori dan Aplikasi*. (Cetakan 1). PT Refika Aditama Jl. Mengger Girang No. 98, Bandung.

Zulkarnain, U. (2017). Analisis kebijakan standar pelayanan minimal untuk peningkatan kualitas layanan publik daerah. *Jurnal Analisis Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 1–13.



Lampiran 1

➤ **Draf pertanyaan dengan kepala bidang tanaman pangan dan hortikultura:**

1. Siapa saja pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program bekerja?
2. Bagaimana pelaksanaan dari program bekerja?
3. Apakah faktor kepemilikan lahan dalam program bekerja ini memiliki peran krusial dalam ekonomi?

➤ **Draf pertanyaan dengan kepala bidang pertanian dan peternakan:**

1. Bagaimana dengan sosialisasi yang dilakukan dari dinas pertanian mengenai program bekerja tersebut?
2. Bagaimana prosedur mengenai program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja) dalam menjamin ketahanan pangan masyarakat?
3. Apakah faktor kepemilikan lahan dalam program bekerja ini memiliki peran krusial dalam ekonomi?

➤ **Draf pertanyaan dengan wali nagari lansek kadok:**

1. Bagaimana proses pendampingan dan pengawasan tersebut dari segi tenaga kerjanya sudah mencukupi

➤ **Draf pertanyaan dengan salah satu jorong Nagari Lansek Kadok:**

1. Apakah bapak pernah mengikuti sosialisasi mengenai program bekerja yang dilakukan oleh dinas pertanian tersebut?

➤ **Draf pertanyaan dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK):**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Bagaimana pelaksanaan dari program bekerja?
2. Apakah dari dinas pertanian telah melakukan sosialisasi mengenai program bekerja tersebut dan apa saja yang disampaikan dalam sosialisasi tersebut mengenai program bekerja?
3. Apakah ada hambatan dalam pelaksanaan program bekerja?

➤ **Draf pertanyaan dengan masyarakat**

1. Apakah ibuk pernah mengikuti sosialisasi dari program bekerja tersebut?
2. Apakah ibuk pernah mendapatkan bantuan dari program bekerja tersebut?

Lampiran 2

Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura



Wawancara dengan kepala Bidang Pertanian dan Peternakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Wali Nagari Lansek Kadok

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan masyarakat nagari Lansek Kadok

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



BIOGRAFI PENULIS

M. Hendri Martha Pratama yang biasanya akrab dipanggil dengan Hendri lahir di Lubuk Layang pada tanggal 10 Desember 2002. Anak dari Bapak Umar dan Ibu Sier, merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Penulis memulai Pendidikan formalnya di SD Negeri 02 Lubuk Layang (2009-2015), kemudian melanjutkan pendidikan Madrasah Tsanawiyah di MTsN 02 Lansat Kadap (2015-2018), dan melanjutkan sekolah ke SMA Negeri 1 Rao selama tiga tahun (2018-2021). Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Program Studi Administrasi Negara S1. Dalam masa perkuliahan penulis telah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat selama dua bulan, dan penulis juga telah menyelesaikan program pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Merangkai, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Atas berkat dan rahmat Allah Subhanahu WaTa'ala serta doa dan dukungan orang tua tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI PROGRAM BEDAH KEMISKINAN RAKYAT SEJAHTERA (BEKERJA) BERBASIS PERTANIAN DI NAGARI LANSEK KADOK KABUPATEN PASAMAN"** dibawah bimbingan langsung oleh Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si Alhamdulillah pada tanggal 19 Juni 2025 telah di munaqasahkan dan berdasarkan hasil sidang munaqasah penulis dinyatakan **"LULUS"** dengan menyandang gelar sarjana sosial (S.Sos).